

**KAJIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 – 2014**

Balthazar Kreuta¹

kreutabalthazar@gmail.com

Yundy Hafizrianda²

apitika@yahoo.com

Agustina Sanggrangbano³

Ina_djarum@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan, diantaranya untuk (1) Mengetahui perkembangan pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Jayapura; (2) Mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura; (3) Mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jayapura; dan (4) Mengukur efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Jayapura; (5) Merumuskan Kebijakan apa yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengambilan data secara langsung pada bagian Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Jayapura yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2014. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa hal diantaranya, (a) Sumber PAD terbesar Kota Jayapura adalah pajak daerah, terutama yang berasal dari pajak hotel dan restoran; (b) Belanja daerah Kota Jayapura selama tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan yang berfluktuatif, dengan daya serapnya yang cukup tinggi; (c) Tingkat ketergantungan fiskal di Kota Jayapura selama ini masih sangat tinggi, sehingga kemandirian fiskalnya menjadi rendah; (d) Kota Jayapura memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang cukup baik; (e) Secara keseluruhan tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kota Jayapura dapat dikatakan rendah.

Kata Kunci: PAD, belanja daerah, efisiensi dan efektivitas, kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Inti dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat.

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004).

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 diketahui bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi terhadap dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi yaitu sebesar 79,97persen dan ini tergolong Tinggi.

kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio kemandirian juga mengerah digambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 diketahui bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah Kota Jayapura rendah sekali yaitu 12,86 persen Jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat kemampuan/kemandirian suatu daerah maka akan tergolong dalam pola hubungan instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain

dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Mengetahui perkembangan pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Jayapura; (2) Mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura; (3) Mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kota Jayapura; (4) Mengukur efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Jayapura; (5) Merumuskan Kebijakan apa yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Jayapura

METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa angka angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2014. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Jayapura.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengambilan data secara langsung pada bagian Akuntansi Dinas Pengolaan Keuangan dan Aset Kota Jayapura yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2014.

3. Teknik Analisa Data

a) Rasio Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Dalam mengukur kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Jayapura Jika dikaitkan capaian maka capaian pendapatan tersebut dapat ditentukan dengan menghitung rasio antara dengan angka dengan kisaran :

Tabel 1.

Interval Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kontribusi (%)
Sangat Rendah	0 - 60 %
Rendah	61 - 80 %
Cukup Tinggi	80 - 90 %
Tinggi	90 - 100%
Sangat Tinggi	> 100%

b) Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan formulasi (DJPK, 2011)

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Tranfer}}{\text{Total Pendapatan}}$$

c) Rasio Kemandirian Fiskal

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}}$$

d) Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD t1} - \text{PAD t0}}{\text{PAD T0}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura terbentuk oleh 4 (empat) komponen utama yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kota Jayapura cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 PAD Kota Jayapura yang diperoleh sebesar Rp. 52,6 miliar. Dan pada tahun 2014 PAD Kota Jayapura telah meningkat tajam menjadi Rp. 140,6 miliar. Hal ini disebabkan oleh selalu meningkatnya sumbangan setiap komponen yang membentuk pendapatan asli daerah.

Tabel 2.
Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH
2010	26,159,776,977	20,712,637,476	2,384,426,605	3,441,704,996	52,698,546,054
2011	33,308,822,602	23,070,684,681	1,599,224,334	5,513,149,943	63,491,881,560
2012	48,189,155,113	22,754,815,330	2,085,078,817	5,109,263,681	78,138,312,941
2013	62,319,829,545	30,189,601,215	3,715,521,584	7,205,159,588	103,430,111,932
2014	88,962,628,671	37,524,040,438	5,298,321,732	8,826,325,943	140,611,316,784

Sumber: DDA Kota Jayapura, 2010-2014.

Ditinjau dari sisi kontribusi setiap komponen pendapatan asli daerah, selama kurun waktu 2010 – 2014 komponen PAD yang menyumbang dengan jumlah paling besar adalah pajak daerah, kemudian disusul retribusi daerah sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menyumbang dengan jumlah yang paling kecil. Dari kontribusi keempat komponen pendapatan asli daerah tersebut, kontribusi pajak daerah memiliki trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 49,64 persen, dan pada tahun 2014 kontribusinya telah meningkat tajam hingga mencapai 63,27 persen. Kontribusi retribusi daerah memiliki trend yang cenderung menurun selama tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 39,30 persen, dan pada tahun 2014 kontribusinya menurun tajam menjadi 26,69 persen. Sedangkan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah cenderung fluktuatif selama tahun 2010-2014. Kontribusi komponen pendapatan asli daerah terhadap PAD Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini:

Tabel 3.
Kontribusi Komponen PAD Terhadap PAD Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
2010	49.64	39.30	4.52	6.53
2011	52.46	36.34	2.52	8.68
2012	61.67	29.12	2.67	6.54
2013	60.25	29.19	3.59	6.97
2014	63.27	26.69	3.77	6.28

Sumber: Data diolah, 2015.

3.2. Kemandirian Fiskal

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Abdul Halim, 2012). Paul Hersey

dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

1. **Pola hubungan instruktif**, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. **Pola hubungan Konsultatif** campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. **Pola hubungan partisipatif** peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. **Pola hubungan delegatif** campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 4.
Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
2010	52.698.546.054	593.738.052.733	25.935.773.200	672.372.371.987
2011	63.491.881.560	571.217.378.466	83.128.107.300	717.837.367.326
2012	78.138.312.941	700.372.434.085	68.478.307.500	846.989.054.526
2013	103.430.111.932	804.083.016.484	97.959.138.000	1.005.472.266.416
2014	140.611.316.784	721.171.012.746	29.828.126.233	891.610.455.763

Sumber: DDA Kota Jayapura, 2010-2014.

Pendapatan Daerah Kota Jayapura terbentuk oleh 3 (tiga) komponen utama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kota Jayapura cenderung meningkat setiap tahunnya selama tahun 2010-2013, namun mengalami penurunan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pada pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah walaupun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan.

Ditinjau dari sisi komponen pendapatan daerah, selama kurun waktu 2010 – 2014 komponen yang menyumbang dengan jumlah paling besar adalah pendapatan transfer, kemudian disusul pendapatan asli daerah sedangkan lain-lain pendapatan yang sah menyumbang dengan jumlah yang paling kecil. Dari ketiga komponen pendapatan daerah tersebut, pendapatan asli daerah Kota Jayapura memiliki trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung meningkat pada tahun 2010-2014 namun keduanya mengalami penurunan pada tahun 2014. Realisasi komponen pendapatan daerah Kota Jayapura dapat dilihat pada gambar 1. berikut ini:

Gambar 1.

Komponen Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2014



Sumber: Data diolah, 2015.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berkisar antara 8,88 – 19,50 persen. Pada tahun 2010 diperoleh rasio kemandirian keuangan sebesar 8,88 persen. Pada tahun 2011 rasio kemandirian keuangan meningkat menjadi 11,12 persen. Pada tahun 2012 rasio kemandirian keuangan meningkat lagi menjadi 11,16 persen. Pada tahun 2013 rasio kemandirian keuangan semakin meningkat menjadi 12,86 persen, dan pada tahun 2014 rasio kemandirian keuangan semakin meningkat lagi menjadi sebesar 19,50 persen.

Walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rasio kemandirian keuangan Kota Jayapura yang diperoleh dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 – 2014 kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura tergolong kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan hubungan pemerintah daerah Kota Jayapura dengan pemerintah pusat memiliki pola hubungan Instruktif yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah pemerintah daerah Kota Jayapura (pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Kondisi ini terjadi karena PAD Kota Jayapura yang diperoleh pada tahun-tahun tersebut sangat kecil dan belum mampu mencukupi kebutuhan belanja daerah sehingga memerlukan dana pusat yang lebih besar. Rasio kemandirian, kemampuan keuangan dan pola hubungan berdasarkan data fiskal Kota Jayapura, tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.

Kemandirian Fiskal Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER	RASIO	KATEGORI	POLA HUBUNGAN
2010	52,698,546,054	593,738,052,733	8.88	Rendah Sekali	Instruktif
2011	63,491,881,560	571,217,378,466	11.12	Rendah Sekali	Instruktif
2012	78,138,312,941	700,372,434,085	11.16	Rendah Sekali	Instruktif
2013	103,430,111,932	804,083,016,484	12.86	Rendah Sekali	Instruktif
2014	140,611,316,784	721,171,012,746	19.50	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Data diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa, Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih diikuti dengan tingginya dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kota Jayapura masih sangat tergantung dengan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Jayapura masih belum optimal dalam menggali potensi daerah Kota Jayapura. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam hal membayar pajak dan retribusi daerah. Padahal pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura juga ikut meningkat. Tidak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah pun juga ikut meningkat, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

3.3. Ketergantungan Fiskal

Rasio ketergantungan fiskal daerah Kota Jayapura selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berkisar antara 79,57 – 88,30 persen. Pada Tahun 2010 diperoleh rasio ketergantungan fiskal sebesar 88,30 persen. Pada tahun 2011 rasio ketergantungan fiskal menurun menjadi 79,57 persen. Pada tahun 2012 rasio ketergantungan fiskal kembali mengalami peningkatan menjadi 82,69 persen. Namun pada tahun 2013 rasio ketergantungan fiskal menurun kembali menjadi 79,97 persen, dan pada tahun 2014 rasio ketergantungan fiskal meningkat lagi menjadi 80,88 persen.

Tabel 6.
Ketergantungan Fiskal Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO	KATEGORI
2010	593.738.052.733	672.372.371.987	88.30	Tinggi
2011	571.217.378.466	717.837.367.326	79.57	Tinggi
2012	700.372.434.085	846.989.054.526	82.69	Tinggi
2013	804.083.016.484	1.005.472.266.416	79.97	Tinggi
2014	721.171.012.746	891.610.455.763	80.88	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2015.

Dari rasio ketergantungan fiskal yang diperoleh dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 – 2014 ketergantungan fiskal daerah Kota Jayapura tergolong kategori tinggi. Hal ini menunjukkan hubungan pemerintah daerah Kota Jayapura dengan pemerintah pusat memiliki pola hubungan Instruktif yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah pemerintah daerah Kota Jayapura (pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Kondisi ini terjadi karena pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke Kota Jayapura yang diperoleh pada tahun-tahun tersebut sangat tinggi dan bahkan hampir mengimbangi Total APBD Kota Jayapura. Pendapatan transfer

dari pemerintah pusat ke Kota Jayapura sehingga mampu mencukupi kebutuhan belanja daerah Kota Jayapura. Rasio ketergantungan fiskal daerah Kota Jayapura, tersaji dalam tabel 6.

3.4. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Jayapura, tersaji dalam tabel 7 berikut ini:

Tabel 7.

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
2010	52,698,546,054	672,372,371,987	7.84	Sangat Kurang
2011	63,491,881,560	717,837,367,326	8.84	Sangat Kurang
2012	78,138,312,941	846,989,054,526	9.23	Sangat Kurang
2013	103,430,111,932	1,005,472,266,416	10.29	Kurang
2014	140,611,316,784	891,610,455,763	15.77	Kurang

Sumber: Data diolah, 2015.

Derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Jayapura selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berkisar antara 7,84 – 15,77 persen. Pada Tahun 2010 diperoleh derajat desentralisasi fiskal sebesar 7,84 persen. Pada tahun 2011 derajat desentralisasi fiskal meningkat menjadi 8,84 persen. Pada tahun 2012 derajat desentralisasi fiskal meningkat lagi menjadi 9,23 persen. Pada tahun 2013 diperoleh derajat desentralisasi fiskal semakin meningkat menjadi sebesar 10,29 persen, dan pada tahun 2014 derajat desentralisasi fiskal meningkat lebih tinggi lagi yakni sebesar 15,77 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal setiap tahunnya.

Dari rasio derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh dapat diketahui bahwa selama tahun 2010-2012 kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura tergolong kategori “Sangat Kurang mampu”. Hal ini terjadi karena PAD Kota Jayapura yang diperoleh pada tahun-tahun tersebut sangat kecil. Namun tahun 2013-2014 kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura sedikit mengalami peningkatan kategori menjadi “Kurang mampu”. Kondisi ini ditunjang dengan terjadinya peningkatan PAD Kota Jayapura dan diikuti dengan penurunan dana pusat yang akhirnya mempengaruhi total pendapatan daerah.

3.5. Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin

tinggi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti prosentase belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil (Abdul Halim, 2012).

Rasio Keserasian menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Semakin tinggi rasio Keserasian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Rasio belanja operasi terhadap APBD selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berkisar antara 71,34 – 79,56 persen. Rasio belanja operasi terhadap APBD sangat fluktuatif. Rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2011 yakni sebesar 79,56 persen, dan rasio terendah diperoleh pada tahun 2013 dengan rasio sebesar 71,34.

Rasio belanja operasi terhadap APBD yang diperoleh selama tahun 2010-2014 tergolong dalam kategori “Tinggi”. Hal ini menunjukkan tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura dalam mendukung otonomi daerahnya. Rasio belanja operasi terhadap Kota Jayapura, tersaji dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 8.
Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	BELANJA OPERASI	TOTAL APBD	RASIO	KATEGORI
2010	508,560,629,332	672,372,371,987	75.64	Tinggi
2011	571,140,910,916	717,837,367,326	79.56	Tinggi
2012	620,985,711,471	846,989,054,526	73.32	Tinggi
2013	717,326,178,951	1,005,472,266,416	71.34	Tinggi
2014	641,718,596,889	891,610,455,763	71.97	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2015.

Selain ditinjau dari Rasio belanja operasi terhadap APBD, Rasio Keserasian Belanja Daerah Kota Jayapura juga ditinjau dari rasio belanja modal terhadap APBD. Rasio belanja modal terhadap APBD Kota Jayapura selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berkisar antara 17,45 – 23,08 persen. Rasio belanja modal terhadap APBD sangat fluktuatif. Pada Tahun 2010 diperoleh Rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 18,82 persen. Pada tahun 2011 Rasio belanja modal terhadap APBD menurun menjadi 17,45 persen. Namun pada tahun 2012 Rasio belanja modal terhadap APBD kembali meningkat sebesar 20,32 persen, dan semakin meningkat lagi pada tahun 2013 yakni sebesar 23,08 persen. Tetapi sangat disayangkan karena pada tahun 2014 Rasio belanja modal terhadap APBD kembali menurun menjadi 22,18 persen.

Rasio belanja modal terhadap APBD yang diperoleh selama tahun 2010-2014 tergolong dalam kategori “Rendah Sekali”. Hal ini menunjukkan sangat rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Jayapura dalam mendukung otonomi daerahnya. Rasio belanja modal terhadap Kota Jayapura, tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 9.

Rasio Belanja Modal Terhadap APBD Kota Jayapura Tahun 2010-2014

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL APBD	RASIO	KATEGORI
2010	126,529,018,995	672,372,371,987	18.82	Rendah Sekali
2011	125,282,372,634	717,837,367,326	17.45	Rendah Sekali
2012	172,124,307,027	846,989,054,526	20.32	Rendah Sekali
2013	232,045,349,068	1,005,472,266,416	23.08	Rendah Sekali
2014	197,740,859,861	891,610,455,763	22.18	Rendah Sekali

Sumber: Data diolah, 2015.

3.6. Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan PAD, pemerintah daerah dapat digunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah Ketentuan yang menyangkut persyaratan yakni, Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75 persen dari penerimaan APBD tahun sebelumnya, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5 persen.

Kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pinjaman dapat dilihat dari Debt Service Coverage Ratio (DSCR). DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti pajak penghasilan perorangan, dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang telah jatuh tempo. Bila dirumuskan secara matematis perhitungan DSCR yaitu :

$$DSCR = \frac{(A + B) - BW}{(P + B + BL)} \geq 2,5$$

1. DSCR = Debt Service Coverage ratio
2. PAD = Pendapatan Asli Daerah
3. BD = Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan
4. DAU = Dana Alokasi Umum
5. BW = Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan
6. P = Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo anggaran yang bersangkutan
7. B = Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan
8. BL = Biaya Lainnya Yang Jatuh Tempo (Biaya komitmen, Biaya Bank dan Lain-lain yang jatuh tempo).

3.7. Efisiensi Belanja Daerah

DEA merupakan salah satu *tool* yang dapat mengukur tingkat relative efisiensi organisasi dengan membandingkan antara input dengan output (Cooper et al, 2006) Sehingga, hasil evaluasinya adalah menentukan tingkat dan nilai efisien dan tidak efisien DMUs. Oleh karena itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur organisasi publik maupun swasta. Bahkan, Oyama (2008) berpendapat bahwa DEA merupakan salah satu teknik dalam *operation research* yang cukup sering digunakan dalam sektor publik. Dalam DEA, objek evaluasi disebut dengan *Decision Making Unit* (DMU) atau Unit Kegiatan Ekonomi (UKE).

DEA bekerja dengan langkah mengidentifikasi unit-unit yang akan dievaluasi, input serta output unit tersebut. Selanjutnya, dihitung nilai produktivitas dan mengidentifikasi unit mana yang tidak menggunakan input secara efisien atau tidak menghasilkan output secara efektif. Produktivitas yang diukur bersifat komparatif atau relatif, karena hanya membandingkan antar unit pengukuran dari 1 set data yang sama. DEA adalah model analisis faktor produksi untuk mengukur tingkat efisiensi relatif dari set unit kegiatan ekonomi (UKE). Skor efisiensi dari banyak fator input dan output dirumuskan sebagai berikut (Talluri, 2000);

$$Efficiency = \frac{\text{Jumlah output tertimbang}}{\text{Jumlah input tertimbang}}$$

Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangya (total weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat : (1) tidak bernilai negatif , dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output/total weighted input <1).

1. Memaksimumkan $Z_k = \sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}$
 2. Dengan batasan/kendala
 - $\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk} - \sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik} \leq 0 ; j = 1, \dots, n$
 - $\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik} = 1, \dots, n$
 - $U_{rk} \geq 0 ; r = 1, \dots, s$
 - $V_{ik} \geq 0 ; i = 1, \dots, m$
- Y_{rk} : jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE k
 X_{ik} : jumlah input i yang digunakan UKE k
 S : jumlah output yang dihasilkan
 M : jumlah input yang digunakan
 U_{rk} : bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap UKE k
 V_{ik} : bobot tertimbang dari input i yang dihasilkan tiap UKE k
 Z_k : nilai optimal sebagai indikator efisiensi relatif dari UKE k

Tabel 10.
Tingkat Efisiensi SKPD di Kota Jayapura Menurut DEA

No	SKPD	crste	vrste	scale
1	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	0.516	0.741	0.697
2	Badan Lingkungan Hidup Daerah	0.243	0.266	0.913
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	0.040	0.044	0.898
4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	0.381	0.432	0.882
5	Badan Pengelola Perbatasan	0.691	0.917	0.754
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.123	0.133	0.922
7	Dinas Kebersihan dan Pemakaman	0.101	0.134	0.756
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.185	0.225	0.823
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.118	0.129	0.908
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.318	0.379	0.838
11	Dinas Kesehatan	0.925	0.955	0.968
12	Dinas Pekerjaan Umum	0.010	0.014	0.744
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0.916	0.944	0.971
14	Dinas Pendapatan Daerah	0.476	0.621	0.767
15	Dinas Pendidikan	0.016	0.021	0.752
16	Dinas Perhubungan	0.340	0.435	0.781
17	Dinas Pertanian	1.000	1.000	1.000
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0.968	1.000	0.968
19	Dinas Sosial	0.200	0.213	0.937
20	Dinas Tata Kota	0.147	0.159	0.921
21	Dinas Tenaga Kerja	0.514	0.651	0.791
22	Distrik Abepura	0.410	0.550	0.746
23	Distrik Heram	0.443	0.667	0.664
24	Distrik Jayapura Selatan	0.637	0.710	0.898
25	Distrik Jayapura Utara	0.457	0.595	0.768
26	Distrik Muara Tami	0.904	1.000	0.904
27	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0.835	0.918	0.911
28	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	0.453	0.593	0.764
29	Sekretariat Daerah	0.070	0.077	0.908
mean		0.429	0.501	0.847

Sumber: Data diolah dengan WinDEAP Version 4, 2015.

Teridentifikasi hanya ada 1 SKPD yang dianggap telah menjalankan prinsip-prinsip efisiensi anggaran dalam melaksanakan seluruh kegiatannya jika dibandingkan dengan SKPD-SKPD lainnya. SKPD yang dimaksud adalah Dinas Pertanian, dengan koefisien teknisnya sebesar 1 (sangat efisien). Kemudian ada 4 SKPD yang dianggap efisien, karena skornya mendekati angka 1, Ke-4SKPD yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Distrik Muara Tami. SKPD lainnya dapat dikatakan belum menjalankan prinsip-prinsip efisiensi, dimana koefisien tekniknya dibawah angka 0,90 diantaranya yang paling tidak efisien BPMK, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Seketaris Daerah.

Efisiensi metode DEA adalah efisiensi relatif. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan angka 1 atau 100% maka dapat diketahui input SKPD mana yang belum efisien

penggunaannya dan output SKPD mana yang harus ditingkatkan. Yang dimaksud dengan efisien adalah menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan jumlah input tertentu, atau dengan input minimum dapat menghasilkan output tertentu. Dalam hal ini, yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi SKPD dengan meminimumkan input anggaran
2. Meningkatkan efisiensi SKPD dengan memaksimumkan output manfaat

Jika menggunakan cara pertama, yaitu meminimumkan anggaran untuk memperoleh output tertentu, maka berdasarkan iterasi optimalisasi dalam model DEA diperoleh jumlah anggaran yang sepatutnya dibelanjakan oleh masing-masing SKPD agar dapat dinilai efisien sebagai berikut :

Tabel 11.

Tingkat Efisiensi SKPD di Kota Jayapura Menurut DEA

No	SKPD	Orginal Value	Radial Movement	Projected Value
1	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	1,484.27	766.55	717.72
2	Badan Lingkungan Hidup Daerah	4,165.95	1,011.50	3,154.45
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	24,910.75	988.17	23,922.58
4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	2,546.00	970.67	1,575.33
5	Badan Pengelola Perbatasan	1,200.02	829.25	370.78
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,360.71	1,028.26	7,332.45
7	Dinas Kebersihan dan Pemakaman	8,200.00	831.43	7,368.57
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,892.67	905.06	3,987.61
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,532.87	1,002.75	7,530.12
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,900.00	921.46	1,978.54
11	Dinas Kesehatan	2,813.84	1,122.31	1,691.54
12	Dinas Pekerjaan Umum	89,230.76	817.95	88,412.82
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5,632.00	1,128.87	4,503.13
14	Dinas Pendapatan Daerah	1,772.50	843.46	929.04
15	Dinas Pendidikan	51,562.97	827.06	50,735.91
16	Dinas Perhubungan	2,528.31	858.77	1,669.54
17	Dinas Pertanian	9,592.29	0	9,592.29
18	Dinas Prindustrian, Perdagangan dan Koperasi	5,761.13	1,220.72	4,540.41
19	Dinas Sosial	5,299.60	1,058.15	4,241.45
20	Dinas Tata Kota	7,000.00	1,026.44	5,973.56
21	Dinas Tenaga Kerja	1,690.94	869.71	821.24
22	Distrik Abepura	2,000.00	820.13	1,179.87
23	Distrik Heram	1,250.00	730.46	519.54
24	Distrik Jayapura Selatan	1,550.00	987.44	562.56
25	Distrik Jayapura Utara	1,850.00	845.28	1,004.72
26	Distrik Muara Tami	1,100.00	994.73	105.27
27	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1,205.00	1,006.76	198.24
28	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	855.00	840.54	14.46
29	Sekretariat Daerah	11,342.35	1,002.38	10,339.97

Sumber: Data diolah dengan WinDEAP Version 4, 2015.

Dengan struktur belanja SKPD seperti ini, dan nilai manfaat yang diberikan oleh masyarakat dianggap tidak berubah, maka model DEA akan memberi penilaian seluruh SKPD efisien dalam

menggunakan anggarannya, yang diindikasikan dengan angka koefisien teknis efisiensi untuk setiap SKPD sebesar 1 atau 100% yang dinyatakan Efisien.

Tabel 12.
Efisiensi Struktur Belanja SKPD di Kota Jayapura Menurut DEA

No	SKPD	Projected Value	Output
1	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	717.72	31.03
2	Badan Lingkungan Hidup Daerah	3,154.45	27.75
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	23,922.58	27.11
4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	1,575.33	26.63
5	Badan Pengelola Perbatasan	370.78	22.75
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,332.45	28.21
7	Dinas Kebersihan dan Pemakaman	7,368.57	22.81
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3,987.61	24.83
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	7,530.12	27.51
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,978.54	25.28
11	Dinas Kesehatan	1,691.54	24.79
12	Dinas Pekerjaan Umum	88,412.82	22.44
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4,503.13	28.97
14	Dinas Pendapatan Daerah	929.04	27.14
15	Dinas Pendidikan	50,735.91	22.69
16	Dinas Perhubungan	1,669.54	23.56
17	Dinas Pertanian	9,592.29	24.71
18	Dinas Prindustri, Perdagangan dan Koperasi	4,540.41	20.49
19	Dinas Sosial	4,241.45	29.03
20	Dinas Tata Kota	5,973.56	28.16
21	Dinas Tenaga Kerja	821.24	23.86
22	Distrik Abepura	1,179.87	22.50
23	Distrik Heram	519.54	33.04
24	Distrik Jayapura Selatan	562.56	27.09
25	Distrik Jayapura Utara	1,004.72	23.19
26	Distrik Muara Tami	105.27	27.29
27	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	198.24	27.62
28	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	14.46	23.06
29	Sekretariat Daerah	10,339.97	27.50

Sumber: Data diolah dengan WinDEAP Version 4, 2015.

Perlu dipahami bahwa besarnya anggaran yang dinilai efisien pada setiap SKPD ini bukan merupakan rekomendasi untuk menetapkan jumlah anggaran SKPD yang semestinya di masa mendatang. Anggaran yang disampaikan ini hanyalah simulasi historis yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi SKPD untuk menyusun anggaran dan merencanakan kegiatannya sebaik mungkin sehingga dengan

anggaran belanja yang minimum, namun hasil kegiatannya dapat dinilai besar manfaatnya oleh masyarakat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil, yaitu diantaranya:

- a) Sumber PAD terbesar Kota Jayapura adalah pajak daerah, terutama yang berasal dari pajak hotel dan restoran. Adapun peranan retribusi daerah terhadap total PAD relatif lebih rendah dibandingkan pajak daerah, dimana retribusi perijinan tertentu merupakan kontributor terbesar dalam komposisi retribusi daerah, yang dominan pada retribusi minuman beralkohol.
- b) Belanja daerah Kota Jayapura selama tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan yang berfluktuatif, dengan daya serapnya yang cukup tinggi. Belanja sektor pemerintahan umum masih mendominasi total belanja di Kota Jayapura, melebihi belanja pada sektor-sektor kunci yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk Belanja sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, serta sektor kehutanan proporsinya menempati posisi terendah di Kota Jayapura. Meskipun sektor-sektor tersebut termasuk motor penggerak perekonomian wilayah.
- c) Tingkat ketergantungan fiskal di Kota Jayapura selama ini masih sangat tinggi. Sehingga kemandirian fiskalnya menjadi rendah. Dengan kondisi seperti ini akhirnya Kota Jayapura tergolong dalam pola hubungan yang instruktif terhadap pemerintah pusat, dimana peranan pusat masih sangat dominan untuk memenuhi belanja daerah.
- d) Jika dilihat dari kemampuan keuangannya untuk melakukan pinjaman daerah, terindikasi selama ini Kota Jayapura memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang cukup baik. Paling tidak pinjaman sebesar 500 milyar lebih dapat dijamin dikembalikan dalam selang waktu 5 tahun, yang mana hal ini tercermin pada rasio DSCR Kota Jayapura yang tergolong cukup tinggi.
- e) Secara keseluruhan tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kota Jayapura dapat dikatakan rendah, yang disebabkan sebagian besar SKPD pelaksana anggaran belum optimal mencapai target outcome yang ditetapkan. Penilaian ini didasari oleh persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD belum maksimal memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, sehingga tidak sebanding dengan anggaran belanja yang dikeluarkan. Namun demikian, dari 29 SKPD yang dinilai tingkat efisiensinya ada 1 SKPD yang terindikasi sudah efisien yaitu Dinas Pertanian. Sedangkan beberapa SKPD lainnya ada juga yang sudah hampir mencapai tingkat efisien yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop dan Distrik Muara Tami. Karena itu bagi SKPD yang belum mencapai efisien perlu menjadikan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas

Perindagkop, dan Distrik Muara Tami sebagai benchmark untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dimasa mendatang.

2. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa simpulan di atas, maka hasil kajian ini dapat merekomendasikan:

- a) Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang potensial, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota perlu memanfaatkan peluang tersebut semaksimal mungkin, dalam hal lebih meningkatkan PAD-nya melalui penambahan jenis pajak baru, perluasan basis pajak, dan diskresi. Untuk jenis pajak baru bagi kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah dimasukkannya 2 (dua) jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah yakni pajak kabupaten/kota. Selain pengalihan kedua jenis pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota tersebut, terdapat pula pengalihan pajak provinsi yakni Pajak Air Tanah yang juga dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota. Pajak baru untuk kabupaten/kota yang terakhir adalah Pajak Sarang Burung Walet. Kemudian dari retribusi, terdapat 4 (empat) jenis retribusi kabupaten/kota yang baru yakni Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- b) Pemerintah Kota Jayapura perlu memperluas basis pajak dan retribusi, terutama pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan untuk retribusi adalah Retribusi Izin Gangguan dengan mengoptimalkan pengenaan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini dapat dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- c) Pemerintah Kota Jayapura perlu meningkatkan diskresi, khususnya penerapan tarif pajak maksimum.
- d) Sektor pendidikan dan kesehatan sangat terkait erat secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah kota perlu memiliki komitmen yang tinggi setiap tahunnya untuk mengalokasikan minimal belanja pendidikan dan kesehatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- e) Pemerintah kota sepatutnya meningkatkan daya serap belanja, dan belanja per kapita agar pelayanan pada masyarakat selalu dapat ditingkatkan setiap tahun.

- f) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah dengan cara memperbaiki dan meningkatkan pemahaman pengelola keuangan daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian berkaitan dengan SDM pengelolaan keuangan daerah yang masih kurang, maka perlu ada lembaga Ad Hoc yaitu pembentukan Klinik Perencanaan dan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan bantuan berupa : pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Selain itu perlu juga didukung dengan pendampingan dalam penyusunan RKA-SKPD, KUA-PPAS bagi TAPD, dan penguatan MKPP pada seluruh SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfians, Lains, *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*, Prisma, No. 4, 1985
- Amal, Ichlasul, *Hubungan Pusat Daerah dalam Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- APBD Pemerintah Kota Jayapura tahun 2010 – 2012, BPS, Jayapura dalam angka tahun 2010
- BPS, Jayapura Dalam Angka, Tahun 2001
- Bryant, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta, 1997
- Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1989
- Davey, K, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI Press, Jakarta, 1998
- Desentralisasi Fiskal, Tinjauan dan Implikasinya Bagi Repelita VI, Laporan Penelitian FE, UGM, 1994
- Jaya, WK, *Kebutuhan Informasi Keuangan Daerah di Indonesia*, PT, Enda Prosindo, Jakarta, 1996
- Johanes, Fernandes, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional Dimasa Depan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996
- Koesoemahatmaja, *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979
- Kunarjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1993
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992
- Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Murgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Nurdjaman, Arsyad, *Hubungan Fiskal antar Pemerintah di Indonesia*, Jakarta, 1999